

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1 Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan yang meliputi 266 Desa dan 12 Kelurahan serta terbagi dalam 966 Dusun, 1.335 Rukun Warga (RW) dan 5.459 Rukun Tetangga (RT). Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara saat ini dipimpin oleh Bupati Budhi Sarwono dan Wakil Bupati H.Syamsudin, S.Pd., M.Pd yang menjabat pada periode 2017-2022. Dalam mewujudkan tujuan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan sebagai daerah otonom. Pemerintahan Budhi Sarwono dan Syamsudin ini memiliki visi dan misi dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut :

Visi :

“ BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Misi :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan demokratis
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik

3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah bertugas untuk membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai representasi suara masyarakat , kinerja DPRD di bingkai dalam tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi , fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan . Dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat , DPRD kabupaten banjarnegara telah melakukan upaya optimal dengan memaksimalkan kinerja DPRD yang tentunya berada dalam tiga koridor fungsi tersebut . Dalam pelaksanaan fungsi legislasi , DPRD telah melakukan berbagai terobosan berarti dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang di butuhkan masyarakat . Dalam fungsi penganggaran , DPRD berupaya menjaga konsistensi siklus penganggaran daerah sehingga pembahasan dan penetapan anggaran daerah baik APBD Murni maupun APBD Perubahan selalu di lakukan

tepat waktu . Dalam melakukan fungsi pengawasan , DPRD terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dalam beberapa tahun belakangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2024 sebanyak 50 orang yang memiliki kedudukan dalam alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Pimpinan DPRD

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan lembaga yang bersifat kolektif dan dipilih berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak, dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/106 Tahun 2019 Tanggal 23 September 2019. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Tabel 2.1

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Parpol
1.	Ismawan Setya Handoko, SE	Ketua DPRD	PDI Perjuangan
2.	H. Arif Budi Waluyo, SE	Wakil Ketua DPRD	PKB
3.	Guruh Triadi Putra, S.Akun	Wakil Ketua DPRD	Demokrat
4.	Edy Purwanto	Wakil Ketua DPRD	PPP

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerjasama antara Ketua dan Wakil Ketua
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- d. Menjadi juru bicara DPRD
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
- g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
- h. Mewakili DPRD di pengadilan

- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
- k. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2.1.2 Badan Musyawarah DPRD

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah merangkap anggota. Tabel berikut adalah Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024 :

Tabel 2.2

Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjarnegara
Masa Jabatan 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	PARPOL
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDIP
2.	H. ARIF BUDI WALUYO, SE	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PKB

3.	GURUH TRIADI PUTRA, S.Akun	WAKIL MERANGKAP ANGGOTA	KETUA DEMOKRAT
4.	H. EDY PURWANTO	WAKIL MERANGKAP ANGGOTA	KETUA PPP
5.	CATUR SUBANDRIO, S.Sos	ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	Drs. H. BAMBANG PS.	ANGGOTA	GOLKAR
7.	ISNAN RIJADI ACHMAD	ANGGOTA	PAN
8.	DYAH WINDARTI, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA
9.	LILIS UJIANTI, S.Ag. M.Pd	ANGGOTA	PPP
10.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	ANGGOTA	PPP
11.	ANWAR, ST	ANGGOTA	PDIP
12.	Hj. SRI HARYATI	ANGGOTA	PDIP
13.	Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI	ANGGOTA	PDIP
14.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH,SH	ANGGOTA	PKB
15.	SITI KOMARIAH	ANGGOTA	PKB
16.	H. KHUSNUL LATHOIF, S.Pd.I	ANGGOTA	PKB
17.	BAMBANG PURNOMO ADI	ANGGOTA	PKB
18.	SLAMET SUNARYONO	ANGGOTA	NASDEM
19.	H. ACHMAD SALABI	ANGGOTA	NASDEM
20.	H. MUKH. NURIN, S.Pd. MM	ANGGOTA	PKS
21.	AGUS JUNAEDI, S.Sos. MM	ANGGOTA	PKS
22.	H. BAWONO, S.Sos, MM	ANGGOTA	GOLKAR
23.	SITI MUDRIATI	ANGGOTA	DEMOKRAT

24.	MOCHAMMAD RAHMANUDIN	ANGGOTA	DEMOKRAT
25.	SLAMET	ANGGOTA	DEMOKRAT
26.	ENDI HARYANTO	ANGGOTA	DEMOKRAT

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari satu masa sidang, perkiraan waktu menyelesaikan suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
- b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- e. Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah

Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada komisi dan fraksi yang diwakilinya

2.1.3 Badan Anggaran DPRD

Badan Anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan keanggotaan DPRD. Badan Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran merangkap Anggota. Susunan keanggotaan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Penetapan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Berikut tabel susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024 :

Tabel 2.3

Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten

Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	PARPOL
1.	ISMAWAN HANDOKO, SE	SETYA KETUA MERANGKAP	PDIP

		ANGGOTA	
2.	H. ARIF BUDI WALUYO, SE	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PKB
3.	GURUH TRIADI PUTRA, S.Akun	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	DEMOKRAT
4.	H. EDY PURWANTO	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PPP
5.	CATUR SUBANDRIO, S.Sos	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
6.	H. BAWONO, S.Sos. MM	ANGGOTA	GOLKAR
7.	M. GURUH DA PAMUJI	ANGGOTA	GOLKAR
8.	H. WASIS PUJIARTO	ANGGOTA	PKS
9.	H. PUJO HARDIANSAH	ANGGOTA	PKS
10.	WACHYU HIDAYAT	ANGGOTA	PDIP
11.	dr. AMALIA DESIANA	ANGGOTA	PDIP
12.	Hj. SRI HARYATI	ANGGOTA	PDIP
13.	H. DIDI SUNARYO	ANGGOTA	PDIP
14.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH. MH	ANGGOTA	PPP
15.	GALIH PAMUNGKAS, A.Md	ANGGOTA	PPP
16.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	ANGGOTA	PAN
17.	H. SLAMET SANTOSO, B.Sc	ANGGOTA	PAN
18.	AKHMAD SRIYADI	ANGGOTA	PAN
19.	Hj. Dra. ISTI'ANATUN MINALLOH, MM	ANGGOTA	PKB

20.	H. KHUSNUL LATHOIF, S.Pd.I	ANGGOTA	PKB
21.	SAMSUL BACHRI AL TUGIYO	ANGGOTA	PKB
22.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm. Apt	ANGGOTA	NASDEM
23.	NURUL IPTAK	ANGGOTA	NASDEM
24.	MOCHAMMAD RAHMANUDIN	ANGGOTA	DEMOKRAT
25.	ANA SUSANTO	ANGGOTA	DEMOKRAT
26.	REVI TENEL LIA, A.Md	ANGGOTA	DEMOKRAT

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya APBD
- b. Membahas dan memberikan masukan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna
- d. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai rancangan APBD, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati
- e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD

2.1.4 Komisi-komisi DPRD

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatannya. Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD harus menjadi anggota komisi. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara beranggotakan lebih dari 35 orang, membentuk empat komisi dengan jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama. Penempatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan pada usul fraksinya. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna atau usul fraksi pada awal tahun anggaran. Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan, masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. Berikut merupakan susunan keanggotaan komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Banjarnegara :

Tabel 2.4

Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Kabupaten
Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

NO	KOMISI	NO	NAMA	JABATAN	PARPOL
A.	KOMISI I	1.	H. HARDIANSYAH	PUJO KETUA	PKS

BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN	2.	H. MARSUDIN, A.Md	WAKIL KETUA	GERINDA
	3.	H. BAMBANG SUPARNO	SEKRETARIS	PKB
	4.	M. SOLAKHUDIN F	ANGGOTA	PDIP
	5.	SRI RAHAYU, SH, MM, MH	ANGGOTA	PKB
	6.	DIAN EKA WINIARTININGSIH, SE	ANGGOTA	PPP
	7.	H. DIDI SUNARYO	ANGGOTA	PDIP
	8.	Drs. BAMBANG PS	ANGGOTA	PAN
	9.	SLAMET SUNARYO	ANGGOTA	NASDEM
	10.	AGUS JUNAIDI, S.Sos, MM	ANGGOTA	GOLKAR
	11.	ENDI HARYANTO	ANGGOTA	DEMOKRAT
	12.	ACHMAD SALABI	ANGGOTA	PAN

B. KOMISI II				
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	1.	MOCHAMMAD RACHMANUDIN	KETUA	DEMOKRAT
	2.	SITI KOMARIAH	WAKIL KETUA	PKB
	3.	ISNAN RIJADI ACHMAD	SEKRETARIS	PAN
	4.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	ANGGOTA	PKB
	5.	NURUL IPTAK	ANGGOTA	NASDEM
	6.	GALIH PAMUNGKAS, A.Md	ANGGOTA	PPP
	7.	MOH, NURIN, S.Pd	ANGGOTA	PKS
	8.	ANWAR, ST	ANGGOTA	NASDEM

	9.	Hj. SRI HARYATI	ANGGOTA	PDIP
	10.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	ANGGOTA	DEMOKRAT
	11.	DJARKASI, S. Th.I	ANGGOTA	GOLKAR
	12.	DYAH WINDARTI M, A.Md	ANGGOTA	GERINDRA

C. KOMISI III	1.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	KETUA	PAN
BIDANG PEMBANGUNAN	2.	SAMSUL BACHRI AL TUGIYO	WAKIL KETUA	PKB
	3.	SLAMET	SEKRETARIS	DEMOKRAT
	4.	WASIS PUJIARTO	ANGGOTA	PKS
	5.	WACHYU HIDAYAT	ANGGOTA	PDIP
	6.	MARNO	ANGGOTA	PDIP
	7.	SITI MUDRIYATI, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
	8.	BAMBANG PURNOMO ADI	ANGGOTA	NASDEM
	9.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	ANGGOTA	PPP
	10.	BAWONO, S.Sos. MM	ANGGOTA	GOLKAR
	11.	AKHMAD SRIYADI	ANGGOTA	GERINDRA

D. KOMISI IV	1.	Hj. ISTI'ANATUN MINALLOH, MM	Dra. KETUA	PKB
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.	ANA SUSANTO	WAKIL KETUA	DEMOKRAT
	3.	H. DEDI SUROMLI	SEKRETARIS	PKS

4.	dr.	AMALIA	ANGGOTA	PDIP
		DESIANA		
5.	Hj. DC.	SRI	ANGGOTA	PDIP
		NURNAENI		
6.	H.	KHUSNUL	ANGGOTA	PKB
		LATOIF, S.Pd.I		
7.	REVI TENEL	LIA,	ANGGOTA	HANURA
		A.Md		
8.	UDANI	PUJI	ANGGOTA	NASDEM
		LESTARI, S.Farm.		
		Apt		
9.	LILIS	UJIANI,	ANGGOTA	PPP
		S.Ag, M.Pd		
10.	H.	SLAMET	ANGGOTA	PAN
		SANTOSO, B.Sc		
11.	M.	GURUH DA	ANGGOTA	GOLKAR
		PAMUJI		

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Tugas Komisi-komisi DPRD Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

- a. Mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- c. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati/ atau masyarakat kepada DPRD
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah

- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

2.1.5 Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan adalah satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun. Berikut merupakan susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjarnegara :

Tabel 2.5

Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjarnegara
Masa Jabatan 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	PARPOL
1.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	KETUA	PKB
2.	ACHMAD SALABI	WAKIL KETUA	PAN

3.	ISNAN RIJADI ACHMAD	ANGGOTA	PAN
4.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	ANGGOTA	DEMOKRAT
5.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH. MH	ANGGOTA	PPP

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menajaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik DPRD
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/ atau Masyarakat
- d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna DPRD.

Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain

- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik dan/ atau Peraturan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) merupakan perubahan nama dari Badan Legislasi Daerah (BALEGDA), hal ini untuk menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu mengacu pada Pasal 409 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Begitupun dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda). Hal ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangan dari anggota DPRD. Istilah legislasi hanya diperuntukan untuk DPR RI, mengingat DPR RI memiliki kewenangan membuat peraturan daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap berjumlah 13 anggota. Di bawah ini merupakan susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banjarnegara :

Tabel 2.6

Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD
Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN	PARPOL
1.	Drs. H. BAMBANG PS	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PAN
2.	SRI RAHAYU, SH, MM, MH	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	DEMOKRAT
3.	CATUR SUBANDRIO, S.Sos	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD

4.	DJARKASI, S.Th.I	ANGGOTA	GOLKAR
5.	M. SOLAKHUDIN F	ANGGOTA	PDIP
6.	BAMBANG SUPARNO	ANGGOTA	PKB
7.	SITI MUDRIATI, SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
8.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	ANGGOTA	PPP
9.	H. MARSUDIN, A.Md	ANGGOTA	PAN
10.	H. DEDI SUROMLI, S.Pd	ANGGOTA	PKS
11.	BAMBANG PURNOMO ADI	ANGGOTA	NASDEM
12.	SITI KOMARIAH	ANGGOTA	PKB
13.	MARNO	ANGGOTA	PDIP

Sumber : Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :

1. Menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
2. Koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/ atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD

5. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/ atau gabungan Komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau diluar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah
6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus
7. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

2.2 Penduduk

Tabel 2.7

Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin, dan Kecamatan di
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Kecamatan		Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)		(2)	(3)	(4)
01.	Susukan	26 888	27 372	98,23
02.	Purwareja Klampok	20 628	21 151	97,53
03.	Mandiraja	32 379	33 018	98,06
04.	Purwanegara	33 788	34 621	97,59
05.	B a w a n g	27 921	28 039	99,58
06.	Banjarnegara	34 537	34 250	100,84
07.	Pagedongan	17 657	17 680	99,87
08.	S i g a l u h	15 886	15 292	103,88
09.	Madukara	22 141	21 711	101,98
10.	Banjarmangu	21 939	21 472	102,17
11.	Wanadadi	14 507	14 811	97,95
12.	R a k i t	23 601	24 018	98,26
13.	Punggelan	37 449	37 516	99,82
14.	Karangkoobar	15 458	14 929	103,54
15.	Pagentan	18 400	17 979	102,34
16.	Pejawaran	21 370	20 763	102,92
17.	B a t u r	19 831	19 291	102,80
18.	Wanayasa	24 171	23 114	104,57
19.	Kalibening	21 182	21 117	100,31
20.	Pandanarum	10 170	10 172	99,98
J u m l a h		459 903	458 316	100,35
Tahun 2017		457 295	455 622	100,37
Tahun 2016		454 585	452 825	100,39
Tahun 2015		451 825	449 989	100,41
Tahun 2014		450 374	448 522	100,41

Sumber : <https://banjarnegarakab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/42/penduduk-menurut-jenis-kelamin-rasio-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kab-banjarnegara-tahun-2015.html>
(diakses pada 14 April pukul 22.04 WIB)

Dari data di atas dapat dilihat pada tahun 2018, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banjarnegara sejumlah 918.219 jiwa yang terdiri dari 459.903 laki-

laki dan 458.316 perempuan, dapat dikatakan hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 5.302 jiwa atau 0,58%. Kepadatan penduduk pada akhir tahun 2018 sebesar 858 jiwa per km² yang berarti setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara dihuni sekitar 858 orang.¹

Tabel 2.8

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2019

Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara (Jiwa)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bekerja	463016	480123	464044	-	464432	478171	467345
Pengangguran Terbuka	20109	20298	24659	-	23025	19915	21876
Total Angkatan Kerja	483125	500421	488703	-	487457	498086	489221

Sumber : <https://banjarnegarakab.bps.go.id/dynamictable/2016/03/21/18/jumlah-angkatan-kerja-kabupaten-banjarnegara-jiwa-di-kabupaten-banjarnegara-tahun-2009-2019.html> (diakses pada 15 April pukul 17.49 WIB)

Menurut publikasi BPS Banjarnegara, banyaknya permintaan tenaga kerja yang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 2.529 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2018 sebanyak 15.308 orang, dengan rincian 7.045 orang laki-laki dan 8.263 orang perempuan.

Tabel 2.9

Penempatan / Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah, 2018

¹ Ubajani, Tri F.(2019).*Kabupaten Banjarnegara Dalam Rangka Banjarnegara Regency In Figures 2019*. Banjarnegara : Perusahaan Daerah Percetakan Banjarnegara

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>		Penempatan / Pemenuhan Tenaga Kerja <i>Placement of Workers</i>		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Kabupaten/Regency				
1.	Cilacap	8.881	8.058	16.939
2.	Banyumas	1.495	4.527	6.022
3.	Purbalingga	1.197	6.593	7.790
4.	Banjarnegara	977	1.880	2.857
5.	Kebumen	1.023	2.899	3.922
6.	Purworejo	1.166	1.841	3.007
7.	Wonosobo	851	2.575	3.426
8.	Magelang	535	1.483	2.018
9.	Boyolali	2.182	3.397	5.579
10.	Klaten	3.138	3.055	6.193
11.	Sukoharjo	1.211	1.174	2.385
12.	Wonogiri	1.808	3.453	5.261
13.	Karanganyar	1.242	1.865	3.107
14.	Sragen	2.601	4.120	6.721
15.	Grobogan	2.913	6.719	9.632
16.	Blora	481	404	885
17.	Rembang	838	331	1.169
18.	Pati	3.797	4.250	8.047
19.	Kudus	678	3.719	4.397
20.	Jepara	2.238	4.284	6.522
21.	Demak	1.836	2.709	4.545
22.	Semarang	1.486	4.796	6.282
23.	Temanggung	272	646	918
24.	Kendal	1.142	6.244	7.386
25.	Batang	918	1.947	2.865
26.	Pekalongan	1.875	2.276	4.151
27.	Pemalang	4.718	6.204	10.922
28.	Tegal	481	848	1.329
29.	Brebes	1.385	4.338	5.723
Kota/Municipality				
30.	Kota Magelang	219	200	419
31.	Kota Surakarta	2.519	3.568	6.087
32.	Kota Salatiga	125	580	705
33.	Kota Semarang	3.418	5.696	9.114
34.	Kota Pekalongan	159	224	383
35.	Kota Tegal	273	266	539

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/statictable/2019/10/15/1734/penempatan-pemenuhan-tenaga-kerja-menurut-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-di-provinsi-jawa-tengah-2018.html> (diakses pada 29 April Pukul 20.49 WIB)

Penempatan / Pemenuhan Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 berjumlah 2.857 dengan rincian 977 untuk jenis kelamin laki-laki dan 1.880 untuk jenis kelamin perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara untuk penempatan atau pemenuhan tenaga kerja masih didominasi oleh kaum perempuan.

Tabel 2.10

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Wilayah Jawa Tengah Menurut Jenis

Kelamin Tahun 2014-2019

Wilayah Jateng	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)									
	Laki-laki					Perempuan				
	2014	2015	2017	2018	2019	2014	2015	2017	2018	2019
PROVINSI										
JAWA	7.47	7.59	7.79	7.86	8.06	6.40	6.50	6.78	6.87	7.03
TENGAH										
Kabupaten Cilacap	6.97	7.14	7.40	7.41	7.42	5.94	6.05	6.44	6.45	6.47
Kabupaten Banyumas	7.90	7.91	7.93	7.94	7.95	6.73	6.75	7.11	7.12	7.14
Kabupaten Purbalingga	7.25	7.26	7.28	7.43	7.47	5.98	6.04	6.48	6.59	6.76
Kabupaten Banjarnegara	6.21	6.53	6.57	6.58	6.66	5.54	5.81	6.08	6.09	6.32
Kabupaten Kebumen	7.34	7.67	7.90	7.94	7.97	6.20	6.45	6.82	6.87	7.09
Kabupaten Purworejo	8.38	8.40	8.42	8.43	8.64	7.07	7.16	7.33	7.34	7.49
Kabupaten Wonosobo	6.32	6.41	6.76	7	7.01	5.80	5.81	6.27	6.50	6.51
Kabupaten Magelang	7.55	7.64	7.87	8	8.30	6.83	6.85	6.95	7.17	7.28
Kabupaten Boyolali	8.01	8.10	8.44	8.45	8.46	6.18	6.58	6.72	6.85	6.94

Kabupaten Klaten	8.70	8.80	8.92	8.93	8.94	7.20	7.56	7.62	7.65	7.77
Kabupaten Sukoharjo	9.30	9.31	9.47	9.48	9.72	8.03	8.04	8.25	8.41	8.67
Kabupaten Wonogiri	7.36	7.37	7.39	7.52	7.61	5.77	5.78	6.13	6.49	6.71
Kabupaten Karanganyar	9.26	9.28	9.30	9.31	9.32	7.70	7.72	7.74	7.91	7.93
Kabupaten Sragen	7.73	7.74	7.84	7.89	8.12	6.04	6.05	6.30	6.60	6.61
Kabupaten Grobogan	6.88	6.89	7.18	7.19	7.35	5.77	5.78	6.13	6.14	6.34
Kabupaten Blora	6.54	6.58	6.98	6.99	7.14	5.52	5.54	5.95	5.96	6.06
Kabupaten Rembang	7.48	7.50	7.52	7.53	7.71	6.37	6.38	6.40	6.41	6.61
Kabupaten Pati	7.07	7.27	7.51	7.77	7.78	6.09	6.21	6.57	6.64	6.69
Kabupaten Kudus	8.75	8.76	8.93	9.19	9.20	7.18	7.20	7.70	8.09	8.10
Kabupaten Jepara	7.55	7.64	7.73	7.81	7.89	6.63	6.65	6.67	6.80	6.81
Kabupaten Demak	8.21	8.23	8.25	8.26	8.27	6.18	6.27	6.81	6.82	6.91
Kabupaten Semarang	8.14	8.15	8.35	8.36	8.44	6.72	6.78	7.43	7.44	7.62
Kabupaten Temanggung	7.03	7.05	7.12	7.20	7.52	5.97	6.19	6.71	6.72	6.80
Kabupaten Kendal	7.38	7.40	7.42	7.64	7.91	6.06	6.08	6.30	6.47	6.63
Kabupaten Batang	6.65	6.96	7.31	7.32	7.33	5.72	5.87	6.05	6.16	6.17
Kabupaten Pekalongan	6.61	6.88	7.06	7.07	7.21	5.82	5.84	6.15	6.31	6.56
Kabupaten Pemasang	6.60	6.62	6.89	6.90	6.94	5.46	5.56	5.65	5.75	5.92
Kabupaten Tegal	6.71	6.96	7.15	7.30	7.44	5.66	5.67	5.97	6.09	6.31
Kabupaten Brebes	6.63	6.64	6.74	6.75	6.76	4.77	4.81	5.36	5.37	5.38
Kota Magelang	10.89	10.90	10.92	10.93	11.05	9.91	9.92	9.94	9.95	9.96
Kota Surakarta	10.90	10.94	10.96	11.09	11.10	9.80	9.82	9.84	10.01	10.09
Kota Salatiga	9.92	10.25	10.68	10.91	10.99	9.05	9.54	9.57	9.93	9.94

Kota Semarang	10.99	11	11.28	11.29	11.41	9.62	9.74	10.13	10.14	10.15
Kota Pekalongan	8.47	8.64	8.93	8.94	8.95	7.78	7.93	8.21	8.22	8.50
Kota Tegal	8.65	8.66	8.68	8.69	8.70	7.28	7.38	7.45	7.71	7.82

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/22/56/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2017.html> (diakses pada 29 April 2020 pukul 20.53 WIB)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjarnegara jenis kelamin perempuan persentasenya mencapai 6,32 atau peringkat ke-25 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki Kabupaten Banjarnegara menduduki peringkat terakhir yaitu dengan presentase 6,66. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Kabupaten Banjarnegara masih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1

Jumlah Kematian Ibu Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU															
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	JUMLAH
1	Kab.Cilacap	26.621	0	5	3	8	0	2	1	3	0	9	2	11	0	16	6	22
2	Kab.Banyumas	26.366	0	2	0	2	0	2	4	6	0	6	2	10	0	12	6	18
3	Kab.Purbalingga	14.656	0	2	0	2	1	4	1	6	0	1	2	3	1	7	3	11
4	Kab.Banjarnegara	15.317	1	1	1	3	0	3	0	3	0	1	2	3	1	5	3	9
5	Kab.Kebumen	19.795	0	1	0	1	0	1	1	2	1	4	2	7	1	6	3	10
6	Kab.Purworejo	8.888	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	3	6	0	4	3	7
7	Kab.Wonosobo	12.737	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	1	3	5	9
8	Kab.Magelang	17.319	0	1	2	3	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2	4	6
9	Kab.Soyolali	13.640	0	4	0	4	0	5	0	5	1	5	0	6	1	14	0	15
10	Kab.Klaten	15.786	0	2	3	5	0	1	1	2	0	3	3	6	0	6	7	13
11	Kab.Sukoharjo	12.550	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	2	4
12	Kab.Wongorejo	10.853	0	1	1	2	0	1	0	1	0	2	2	4	0	4	3	7
13	Kab.Karanganyar	11.901	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	4	1	1	3	5
14	Kab.Sragen	13.771	0	1	3	4	0	0	0	0	1	9	1	11	1	10	4	15
15	Kab.Grobogan	20.322	0	9	2	11	0	0	0	0	1	12	7	20	1	21	9	31
16	Kab.Blora	11.213	0	0	2	2	0	3	1	4	0	6	1	7	0	9	4	13
17	Kab.Rembang	8.775	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	1	8	0	8	1	9
18	Kab.Pati	16.649	0	7	1	8	0	1	1	2	0	0	1	1	0	6	3	11
19	Kab.Kudus	15.157	0	5	0	5	0	0	0	0	1	2	2	5	1	7	2	10
20	Kab.Jepara	19.735	0	1	0	1	0	1	1	2	0	7	2	9	0	9	3	12
21	Kab.Demak	20.468	1	3	1	5	0	3	1	4	0	9	5	14	1	15	7	23
22	Kab.Semarang	13.599	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	3	3	1	1	5	7
23	Kab.Temanggung	10.221	0	1	2	3	0	0	0	0	0	5	1	6	0	6	3	9
24	Kab.Kendal	15.496	0	5	0	5	0	3	2	5	0	7	1	8	0	15	3	18
25	Kab.Batang	12.516	0	4	1	5	0	4	1	5	0	5	5	10	0	13	7	20
26	Kab.Pekalongan	16.054	0	1	0	1	0	0	0	1	4	5	5	10	1	5	5	11
27	Kab.Pemalang	25.396	0	2	2	4	0	1	1	2	2	5	4	11	2	6	7	17
28	Kab.Tegal	26.916	0	1	1	2	0	7	1	8	0	3	0	3	0	11	2	13
29	Kab.Brebes	32.079	0	5	2	10	0	1	0	1	0	14	5	19	0	23	7	30
30	Kota Magelang	1.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
31	Kota Surakarta	9.530	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	0	4
32	Kota Salatiga	2.551	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	2	3
33	Kota Semarang	25.074	0	3	2	5	0	1	0	1	0	11	2	13	0	15	4	19
34	Kota Pekalongan	5.911	0	0	2	2	0	0	2	2	0	1	2	3	0	1	6	7
35	Kota Tegal	4.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
JUMLAH (KAB/KOTA)		335.630	2	72	33	107	2	47	24	73	11	155	75	241	15	274	132	421
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																		76,60

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah ibu melahirkan yang hidup di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 berjumlah 15,317. Kabupaten Banjarnegara menduduki peringkat ke-15 dari 35 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kematian ibu hamil 3, jumlah kematian ibu bersalin 3, jumlah kematian ibu nifas 3, dan jumlah kematian ibu 9.

Potensi kekuatan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya berasal dari Sumber Daya Alamnya saja, melainkan juga Sumber Daya Manusia sebagai faktor produksi. Sehingga pemerintah bekerjasama dengan swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Mayoritas warga Banjarnegara yang hanya berpendidikan tingkat SMP, mereka biasanya melakukan kegiatan perdagangan seperti Usaha Mikro Kecil yang

menjadi andalan dari Kabupaten Banjarengara ². UMK juga tidak hanya sebagai tumpuan mata pencaharian penduduk tetapi juga sebagai sumber aktivitas yang dapat meningkatkan perekonomian Banjarnegara ditingkat nasional maupun regional. Selain itu, perekonomian Banjarnegara juga dipengaruhi dengan menguatnya perkembangan yang cukup pesat pada perdagangan, industri pengelolaan, konstruksi dan jasa pendidikan. Pada tahun 2016 kategori tersebut mencapai 5,41 %.

Tabel 2.11

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga

Konstan menurut Lapangan Usaha, 2017-2019

Kategori	Uraian	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 972 652,45	4 118 607,41	4 264 176,29
B	Pertambangan dan Penggalian	741 872,35	765 986,89	790 944,77
C	Industri Pengolahan	1 847 971,20	1 966 571,95	2 104 761,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4 850,17	5 108,55	5 433,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 523,78	6 835,96	7 133,53
F	Konstruksi	954 457,45	1 012 812,31	1 066 573,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 291 386,59	2 430 271,16	2 579 708,91
H	Transportasi dan Pergudangan	586 261,70	626 653,63	670 732,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	286 187,09	311 433,82	339 823,97
J	Informasi dan Komunikasi	515 851,36	578 668,73	642 841,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	391 798,94	406 491,83	420 078,32

² Ubajani, Tri F.(2016). *Potret Ekonomi Kabupaten Banjarnegara (Hasil Pencacahan Lengkap SE 2016) Potensi Ekonomi Kabupaten Banjarnegara*. Banjarnegara : Badan Statistik Kabupaten Banjarnegara

L	Real Estate	245 190,71	258 798,65	271 345,51
M,N	Jasa Perusahaan	52 725,04	57 507,70	63 507,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479 847,80	491 854,99	504 081,74
P	Jasa Pendidikan	774 645,35	838 809,95	902 906,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179 629,26	196 374,75	210 084,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	331 415,41	365 361,46	402 732,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		13 663 266,65	14 438 149,74	15 246 865,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		13 663 266,65	14 438 149,74	15 246 865,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN		13 183 418,85	13 946 294,75	14 742 783,92

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/22/56/rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2014-2017.html> (diakses pada 29 April 2020 pukul 20.53 WIB)

Perkembangan PDRB harga konstan dari waktu ke waktu dapat disebut dengan pertumbuhan perekonomian yang menggambarkan aktivitas atau kinerja dalam perekonomian di suatu wilayah. Dari tabel di atas, dapat dilihat Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan PDRB disetiap tahunnya, dapat dilihat pula beberapa sektor yang menjadi unggulan potensi perekonomian di Kabupaten Banjarnegara yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengelolaan, konstruksi, serta perdagangan.